

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang tergolong cukup besar, sehingga pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang tinggi kepada perkembangan ekonomi dan sosial di negara Indonesia. Pemerintah melaksanakan pembangunan dengan merencanakan target-target pembangunan di masa mendatang. Pemerintah membuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Pemenuhan program kerja dilakukan dengan membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan daerah (APBD). Anggaran pendapatan pemerintah negara yang cukup besar ini mengharuskan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab sendiri untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya. Dalam setiap perekonomian pemerintah pasti mengeluarkan dana untuk keperluan pembangunan dan memperbaiki fasilitas daerahnya agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Demi mewujudkan keinginan tersebut pemerintah harus memikirkan rencana ekonomi kedepannya. Perlu adanya laporan keuangan yang mencatat sumber pendapatan pemerintah daerah tiap-tiap tahunnya. Pemerintah dapat menyusun anggaran pendapatannya dalam bentuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. APBD adalah salah satu aspek penting dari pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola masalah keuangan dan anggaran suatu daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang merupakan kebijakan utama pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja suatu daerah, dan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan rencana pembangunan kedepannya. APBD juga sebagai alat untuk mengetahui pengeluaran pemerintah daerah dimasa yang akan datang, serta mengevaluasi pendapatan belanja pada tahun-tahun yang akan datang.

Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten yang tergolong kecil. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan laba dari badan usaha milik daerah (BUMD). Pendapatan ini masih sangat kecil sehingga Kabupaten Flores Timur masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur belum dikatakan baik karena realisasi anggaran lebih kecil dari anggaran yang ditargetkan. Perhitungan dan analisis Pendapatan belanja daerah Kabupaten Flores Timur yang dilakukan dengan cara membandingkan rencana kinerja dengan tingkat realisasi, ternyata tingkat pencapaian atas kegiatan dan

sasaran menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2015 dan 2016 buruk. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Flores Timur dapat dilihat dari selisih antara anggaran dengan realiasi anggaran pendapatan tahun 2015 dan tahun 2016. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk BKD di setiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi dalam penyerapannya belum optimal. Pendapatan pada anggaran tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp. 871.416.175.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 845.682.840.086,01. (Realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Flores Timur, tahun 2015). Pendapatan pada anggaran tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp. 1.076.256.649.700,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.057.777.224.998,36. (Realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Flores Timur, tahun 2016). Anggaran realisasi pendapatan untuk tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 1,23%, namun permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Flores Timur terjadi karena anggaran pendapatan tidak sebanding dengan realisasi anggaran pendapatan tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) yang kecil menjadi masalah utama kabupaten Flores Timur. PAD Kabupaten Flores Timur mengalami ketidakseimbangan dengan pendapatan dari bantuan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya. PAD untuk tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp. 8.433.978.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 7.966.719.690,00. Pada tahun 2016 hal yang sama masih terjadi dimana anggaran PAD sebesar a Rp. 9.637.591.700,00 dan realisasinya sebesar Rp. 9.617.825.831,00. (Realisasi anggaran pendapatan belanja Kabupaten Flores Timur, tahun 2015/2016). Dalam hal ini efektifitas pengendalian anggaran pendapatan

dalam pencapaian targetnya kurang baik dan harus adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi dalam menjelaskan proses dari hasil yang telah dicapai.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengevaluasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nusa Tenggara Timur tepatnya di Daerah Kabupaten Flores Timur dengan judul **“EVALUASI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah realisasi target anggaran pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur sudah tercapai ?
2. Apakah derajat desentralisasi (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Flores Timur pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores tercapai?
3. Apakah realisasi anggaran Kabupaten Flores Timur sesuai dengan target yang telah ditetapkan sudah tercapai?
4. Apakah besarnya biaya pemerolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur sudah efisien ?
5. Apakah pertumbuhan anggaran pendapatan Kabupaten Flores Timur termasuk surplus?

6. Apakah realisasi anggaran belanja daerah Kabupaten Flores Timur sudah tercapai ?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian.

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui ketercapaian realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur.
- b. Untuk mengetahui ketercapaian derajat desentralisasi (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Flores Timur pada badan keuangan daerah Kabupaten Flores Timur.
- c. Untuk mengetahui ketercapaian target realisasi anggaran Kabupaten Flores Timur.
- d. Untuk mengetahui efisiensi biaya pemerolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
- e. Untuk mengetahui surplus pertumbuhan anggaran pendapatan Kabupaten Flores Timur.
- f. Untuk mengetahui ketercapaian realisasi anggaran belanja daerah Kabupaten Flores Timur.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti.

Penelitian ini dapat membantu penulis dalam mengaplikasikan teori anggaran perusahaan yang menjadi pembelajarannya selama berada di Universitas Katolik Widya Karya Malang, serta menambah wawasan dalam pengetahuan.

b. Bagi pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah daerah dalam kabupaten Flores Timur sebagai pedoman dalam menentukan dan menetapkan laporan anggaran pembelanjaan daerah yang lebih transparan dan efisien.

c. Bagi universitas.

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

